



CAPAIAN, PELUANG, DAN TANTANGAN IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT DI INDONESIA

Author

Chiara Anindya Samuel

Editors

Viyasa Rahyaputra

Dirgayuza Setiawan, M.Sc

Designer and Layouter

Fadlillah Zahra Murti

PENGANTAR

Indonesia termasuk salah satu negara dengan perkembangan *e-government* yang stagnan cenderung lambat. Hal ini menarik, mengingat bahwa Indonesia merupakan salah satu pengguna internet terbesar di dunia. Menurut data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Indonesia berada di bawah rata-rata dunia dalam implementasi *e-government*. Secara umum, peringkat *e-government* Indonesia juga terus mengalami penurunan dalam kurun waktu 13 tahun terakhir. Terlepas dari besarnya potensi untuk menerapkan *e-government* di Indonesia, masih banyak tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah untuk menjamin keberhasilan pelaksanaannya. Tulisan ini mengulas dinamika dan komparasi praktik *e-government* di Indonesia secara sub-regional dan regional, serta menganalisis peluang dan tantangan dari praktik *e-government* di Indonesia.

APA ITU *E-GOVERNMENT*?

E-government merujuk pada situasi di mana proses pemerintahan dijalankan dengan bantuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), khususnya internet. Saat ini, seluruh negara di dunia telah memiliki setidaknya satu produk e-government.¹ Maka, pengukuran tingkat implementasi e-government perlu dilakukan guna membandingkan capaian e-government secara global. UN E-Government Survey yang dipublikasikan secara rutin oleh PBB menjadi salah satu rujukan utama untuk mengetahui kinerja e-government masing-masing negara di dunia.

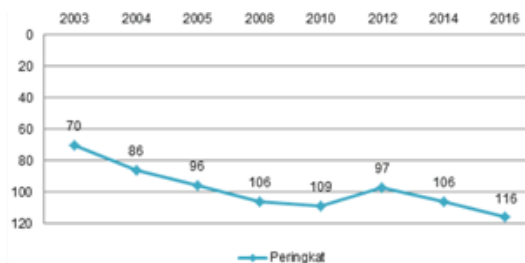
Melalui e-government, masyarakat dapat dilibatkan secara langsung dalam pengelolaan pemerintahan, pelayanan publik, dan pengambilan kebijakan. Pemerintah maupun masyarakat dapat sama-sama menikmati manfaat dari e-government. Penggunaannya mengindikasikan komitmen pemerintah terhadap transparansi dan akuntabilitas, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat dibangun melalui e-government. Selain itu, e-government mendorong terjadinya interaksi dialogis antara masyarakat dan pemerintah.



STATUS-QUO *E-GOVERNMENT* DI INDONESIA

Mengacu pada poin kedua dari nawa cita, *e-government* merupakan salah satu agenda prioritas pemerintah Indonesia. Saat ini, praktik *e-government* di Indonesia dikelola oleh Direktorat *E-Government*, satuan kerja yang dibawah oleh Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika RI berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015.²

Secara yuridis, terdapat setidaknya enam produk hukum di Indonesia yang menggarisbawahi pentingnya inisiatif keterbukaan pemerintah serta partisipasi publik, yang dapat diwujudkan melalui *e-government*. Beberapa regulasi tersebut, di antaranya Pasal 28F UUD 1945, Inpres Nomor 3 Tahun 2003, UU Nomor 25 Tahun 2009, serta UU Nomor 14 tahun 2008. Berdasarkan data PBB, Indonesia tengah menempati peringkat ke-116 dari 193 negara di seluruh dunia dalam hal implementasi *e-government*. Dalam jangka waktu 13 tahun terakhir, peringkat Indonesia cenderung mengalami penurunan. Grafik di bawah dibuat berdasarkan data yang dirilis PBB melalui *UN E-Government Survey*, mulai dari tahun 2003 hingga 2016.



Grafik 1: Peringkat Indonesia dalam UN E-Government Survey 2003-2016

Dalam grafik tersebut, dapat dilihat bahwa Indonesia hanya satu kali mengalami kenaikan peringkat, yakni pada tahun 2012. Menurut grafik tersebut, rata-rata peringkat Indonesia secara global adalah 98,25. Bila dibandingkan dengan keseluruhan negara yang disurvei oleh PBB, yakni 193 negara, Indonesia termasuk negara dengan capaian *e-government* menengah ke bawah.



SEKILAS TENTANG *UN E-GOVERNMENT SURVEY*

Mulai tahun 2008, PBB rutin mempublikasikan laporan dwi tahunan mereka yang bertajuk *UN E-Government Survey*. Survei tersebut mengukur capaian *e-government* suatu negara berdasarkan efektivitas pelayanan publik dalam enam sektor, yakni sektor pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, ekonomi dan finansial, kesejahteraan sosial, serta lingkungan hidup.³ Untuk melakukan hal itu, mereka mengembangkan *E-Government Development Index* (EGDI), sebuah alat ukur yang terdiri atas tiga buah indeks, yakni: *Telecommunications Infrastructure Index* (TII), untuk mengukur ketersediaan infrastruktur penunjang *e-government*; *Human Capital Index* (HCI), untuk mengetahui gambaran umum demografis masyarakat di masing-masing negara; serta *Online Service Index* (OSI), untuk mengukur *national presence* masing-masing negara melalui situs resmi pemerintah serta kementerian di negara yang bersangkutan.

UN E-Government Survey merupakan laporan makro yang bertujuan untuk mengeksplorasi capaian masing-masing negara di dunia dalam hal *e-government*. Maka, kelemahan utama dari laporan-laporan ini adalah tidak adanya *depth* atau analisis yang mendalam mengenai masing-masing negara secara spesifik. Selain itu, capaian *e-government* hanya diukur dengan mengandalkan EGDI saja. Padahal, saat ini ada banyak negara yang sudah menggunakan saluran *e-government* selain website atau situs resmi. Sejauh ini, *UN E-Government Survey* yang telah dipublikasikan belum mempertimbangkan hal ini. Maka, elaborasi lanjutan mengenai capaian *e-government* di masing-masing negara diperlukan untuk memahami kondisi, peluang, tantangan, dan capaian *e-government* di negara tersebut. Himpunan data dari publikasi tahunan *UN E-Government Survey* dapat menjadi landasan dari elaborasi lanjutan ini.

CAPAIAN *E-GOVERNMENT* INDONESIA SECARA GLOBAL DAN SUB-REGIONAL

Secara umum, capaian *e-government* Indonesia masih berada di bawah rata-rata dunia. Secara sub-regional, capaian Indonesia juga belum mampu menandingi rata-rata performa *e-government* negara-negara di Asia Tenggara. Selain itu, laju perkembangan *e-government* di Indonesia tergolong stagnan dan cenderung lambat. Hal ini dapat diketahui dengan melihat grafik di bawah, yang disusun berdasarkan besaran EGD I Indonesia dan skor rata-rata dunia selama tahun 2003 hingga 2016.



Grafik 2: Komparasi EGD I Indonesia dengan Rata-rata Dunia (2003 – 2016)

Indonesia memiliki rata-rata EGD I sebesar 0,425, atau sedikit di bawah rata-rata EGD I dunia, yakni 0,431. Dalam grafik di atas, garis merah yang merepresentasikan rata-rata dunia terlihat mengalami peningkatan secara konstan, dengan peningkatan signifikan pada tahun 2012. Hal tersebut mengindikasikan adanya peningkatan implementasi *e-government* secara global setiap tahunnya. Dengan kata lain, seluruh negara di dunia cenderung memiliki peningkatan praktik *e-government* secara stabil.

Di sisi lain, grafik Indonesia cenderung lebih dinamis dengan adanya penurunan dan peningkatan skor EGD I. Bila dibandingkan dengan rata-rata dunia, terlihat bahwa performa *e-government* Indonesia cukup fluktuatif, dengan lonjakan yang signifikan pada tahun 2012. Menariknya, Indonesia sempat mengungguli rata-rata dunia pada tahun 2003, namun mengalami penurunan yang cukup drastis pada tahun selanjutnya. Menurut grafik di atas, praktik *e-government* di Indonesia masih belum memiliki konsistensi dan pertumbuhan yang stabil.



Grafik 3: Komparasi EGDl Indonesia dengan Rata-rata Asia Tenggara (2003 - 2016)

Grafik di atas membandingkan capaian Indonesia dengan sepuluh negara lain di Asia Tenggara. Senada dengan capaiannya secara global, capaian *e-government* Indonesia juga berada di bawah rata-rata secara sub-regional. Dengan rata-rata EGDl sebesar 0,425, Indonesia masih kalah dibandingkan rata-rata EGDl Asia Tenggara, yakni sebesar 0,4365.

Performa *e-government* di Asia Tenggara lebih fluktuatif bila dibandingkan dengan performa global. Pada tahun-tahun tertentu, Asia Tenggara mengalami penurunan skor EGDl. Di sisi lain, lonjakan skor juga terjadi pada sejumlah tahun. Bila dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya, performa Indonesia masih berada di bawah rata-rata, kecuali pada tahun 2003, 2012, dan 2014. Walau sempat mengungguli rata-rata sub-regionalnya, Indonesia mengalami penurunan skor EGDl yang cukup drastis pada tahun 2004 dan seterusnya, sedangkan rata-rata Asia Tenggara justru mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

GLOSARIUM

E-Government Development Index (EGDI)

Indeks komposit yang digunakan untuk mengukur kapasitas pemerintah untuk menggunakan TIK dalam berbagai aktivitas pelayanan publik. EGDI merupakan gabungan dari 3 indeks lain, yakni TII, HCI, dan OSI.

Telecommunications Infrastructure Index (TII)

Indeks ini bertujuan untuk mengukur ketersediaan infrastruktur penunjang e-government.

Human Capital Index (HCI)

Indeks ini bertujuan untuk mengukur aspek-aspek yang berkaitan dengan tingkat pendidikan masyarakat di suatu negara.

Online Service Index (OSI)

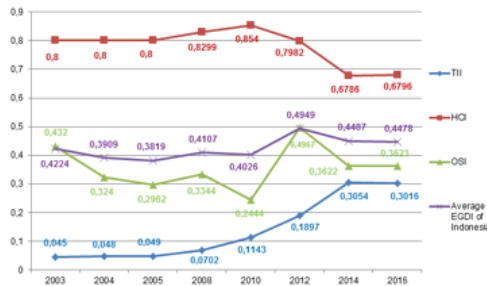
Indeks ini bertujuan untuk mengukur national presence masing-masing negara melalui situs resmi instansi pemerintah di negara yang bersangkutan.

E-Participation Index (EPI)

Indeks ini merupakan indeks tambahan yang bertujuan untuk mengukur tingkat partisipasi masyarakat suatu negara melalui e-government. Indeks ini **tidak** termasuk dalam komponen pengukuran EGDI.

RINCIAN SKOR EGDI INDONESIA

Grafik di bawah disusun berdasarkan data yang dimuat dalam laporan *UN E-Government Survey* mulai tahun 2003 hingga 2016. Berdasarkan grafik di bawah, terlihat bahwa faktor utama yang menyebabkan rendahnya peringkat *e-government* Indonesia adalah keterbatasan infrastruktur. Ketersediaan infrastruktur sangat mempengaruhi kecepatan layanan pemerintah, yang menjadi salah satu alasan rendahnya OSI Indonesia. Menariknya, skor HCI Indonesia pada awalnya terbilang cukup tinggi, namun mendadak menurun secara drastis pada tahun 2012 dan seterusnya.



Grafik 4: Perbandingan TII, HCI, dan OSI dengan EGDI Indonesia (2003 – 2016)

1. Pembahasan: Capaian Sektor TII Indonesia

Dari grafik di atas, dapat diketahui bahwa *Telecommunications Infrastructure Index* (TII) merupakan indeks yang secara keseluruhan memiliki nilai yang paling rendah bila dibandingkan dengan kedua indeks lainnya (HCI dan OSI). Dengan kata lain, ketidaksiapan infrastruktur merupakan faktor utama yang menyebabkan lambatnya perkembangan *e-government* di Indonesia.

Meski demikian, grafik di atas mengindikasikan adanya lonjakan signifikan dalam skor TII dari tahun 2003 hingga 2016. Ini berarti bahwa dalam kurun waktu 13 tahun, terjadi peningkatan jumlah pengguna TIK khususnya internet yang cukup besar di Indonesia.

TII sendiri memiliki lima indikator pengukuran, yakni sebagai berikut: (1) jumlah pengguna internet per seratus orang, (2) jumlah pengguna jaringan telepon per seratus orang, (3) jumlah pengguna telepon genggam per seratus orang, (4) jumlah peng-

-guna *broadband* atau *high speed internet access* per 100 orang, dan (5) jumlah pengguna jaringan *broadband* nirkabel per seratus orang.

Dari kelima indikator tersebut, terdapat sejumlah hal yang penting untuk digarisbawahi. Menurut *UN E-Government Survey*, pengguna internet di Indonesia adalah sebesar 17,14% per seratus orang. Hal ini bertentangan dengan temuan APJII.⁴ Pada tahun 2014 saja, mereka menemukan bahwa tingkat penetrasi internet di Indonesia adalah sebesar 34,8%. Dalam laporan yang mereka rilis pada tahun 2016, APJII menemukan bahwa tingkat penetrasi internet di Indonesia telah mencapai 51,8%.

Laporan yang sama juga menemukan bahwa terdapat 126,18 pengguna telepon genggam per seratus orang di Indonesia. Artinya, sebagian anggota masyarakat memiliki lebih dari satu telepon genggam. Lebih lanjut, ini mengindikasikan besarnya potensi penggunaan produk *e-government* berbasis aplikasi di Indonesia.

2. Pembahasan: Capaian Sektor HCI Indonesia

Menurut laporan PBB, Indonesia merupakan salah satu negara dengan skor HCI yang cukup tinggi. Namun, berbeda dengan indeks TII, skor HCI Indonesia justru mengalami penurunan yang signifikan mulai dari tahun 2012. Walau demikian, HCI tetap merupakan indeks dengan skor yang tertinggi dibandingkan dengan kedua indeks lainnya (TII dan OSI). Indeks ini berkaitan dengan kemampuan masyarakat untuk menggunakan produk-produk *e-government*. HCI memiliki empat indikator pengukuran, yakni: (1) tingkat literasi orang dewasa (*adult literacy rate*), (2) rasio dari akumulasi jumlah pendaftar ke institusi pendidikan dasar, menengah, dan tinggi (pasca SMA), (3) perkiraan lama belajar di institusi pendidikan, serta (4) rata-rata lama belajar di institusi pendidikan.

Dari keempat indikator tersebut, terdapat sejumlah indikator yang penting untuk digarisbawahi. Menurut *UN E-Government Survey 2016*, sebanyak 93,88% dari orang dewasa di Indonesia sudah terliterasi. Artinya, sebanyak 93,88% dari orang yang berusia di atas 15 tahun di Indonesia telah memiliki pengetahuan baca dan tulis. Tingginya tingkat literasi orang Indonesia tersebut menarik untuk disimak, mengingat bahwa Indonesia termasuk salah satu negara dengan minat baca terendah di dunia menurut survei dari Central Connecticut State University pada tahun 2016 silam.⁵ Hal tersebut dapat mengindikasikan beberapa masalah, di antaranya keterbatasan akses terhadap buku dan sumber informasi, serta rendahnya minat belajar masyarakat Indonesia.

Selain itu, indikator ketiga dan keempat dari HCI juga menemukan permasalahan yang signifikan dalam hal lama belajar serta faktanya di lapangan. *UN E-Government Survey* menegaskan bahwa pada tahun 2016, lama waktu belajar di Indonesia untuk pendidikan dasar dan menengah (SD, SMP, dan SMA) adalah 12,99 tahun. Namun nyatanya, rata-rata pelajar Indonesia hanya menghabiskan 7,51 tahun di sekolah. Artinya, masih banyak masyarakat Indonesia yang hanya mengenyam pendidikan hingga SMP.

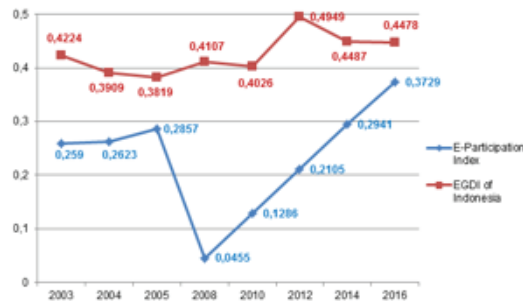


3. Pembahasan: Capaian Sektor OSI Indonesia

Besaran angka OSI sangat berkaitan dengan indeks TII suatu negara. Sebagai negara dengan tingkat TII yang cukup rendah, capaian indeks OSI Indonesia masih jauh di bawah rata-rata dunia. Seperti terlihat dalam grafik di atas, nilai OSI Indonesia cukup dinamis namun cenderung menurun, kecuali pada tahun 2012.

Lewat OSI, dapat diketahui sejauh mana instansi-instansi pemerintah dalam suatu negara telah memanfaatkan situs resmi sebagai saluran informasi bagi masyarakatnya. Sayangnya, seluruh laporan *UN E-Government Survey* hingga saat ini masih belum memperhitungkan penggunaan media komunikasi lain, seperti media sosial, aplikasi, dan lain sebagainya, sebagai bentuk layanan pemerintah.

Selain ketiga indeks di atas, PBB memasukkan sebuah indeks tambahan yang tidak termasuk dalam komponen pengukuran EGDI. Indeks ini bertujuan untuk mengukur tingkat partisipasi masyarakat suatu negara melalui layanan-layanan *e-government*. Grafik berikut menampilkan komparasi antara E-Participation Index (EPI) Indonesia dengan besaran EGDI Indonesia dari tahun 2003 – 2016.



Grafik 5: Perbandingan E-Participation Index dan EGDI Indonesia (2003 – 2016)

Pada grafik di atas, terdapat sebuah kejanggalan pada tahun 2008, di mana terjadi penurunan tajam dalam skor EPI. Dalam *UN E-Government Survey* 2008, setidaknya ada lima negara yang memiliki skor EPI sama dengan Indonesia. Namun, tidak diketahui apa penyebab terjadinya penurunan ini. Pada tahun 2010 dan seterusnya, besaran EPI Indonesia terus mengalami kenaikan secara konstan, hingga mencapai tingkat tertingginya pada 2016 silam.

Walau bukan merupakan salah satu komponen pengukuran EGDI, penting untuk melihat seberapa jauh tingkat partisipasi masyarakat Indonesia dalam *e-government*. Secara umum, EPI Indonesia menunjukkan tren yang positif, walau capaiannya masih tergolong rendah bila dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia.

Rendahnya skor EPI Indonesia ini menarik, menimbang bahwa Indonesia merupakan salah satu negara pengguna internet terbesar di dunia. Artinya, rendahnya tingkat partisipasi masyarakat ini bukan semata-mata permasalahan konektivitas atau aksesibilitas saja, melainkan juga permasalahan minat dan kemampuan untuk menggunakan layanan yang bersangkutan.

Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat melalui *e-government* ini penting untuk dielaborasi guna mengidentifikasi elemen-elemen yang harus diperbaiki pemerintah dalam berbagai produk *e-government* mereka.

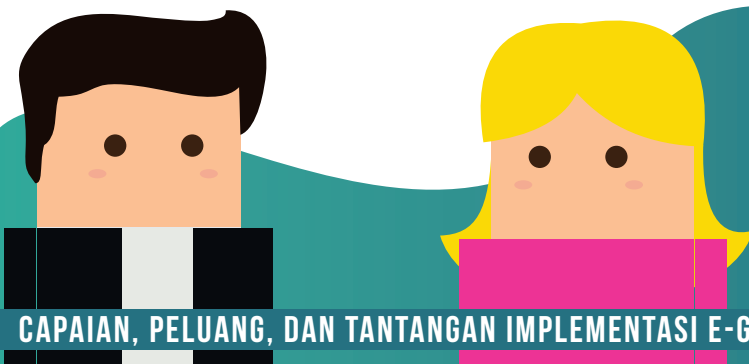
PELUANG *E-GOVERNMENT* DI INDONESIA

Seperti yang telah dibahas sebelumnya, Indonesia merupakan salah satu negara pengguna internet terbesar di dunia. Menurut APJII, Indonesia memiliki setidaknya 132,7 juta pengguna internet pada tahun 2017. Besaran tersebut sama persis dengan data dari Internet World Stats yang diperbarui pada Juni 2017 silam. Besarnya jaringan pengguna internet tersebut merupakan indikator utama yang menegaskan peluang implementasi *e-government* di Indonesia.

Selain itu, praktik *e-government* juga telah diamanatkan dalam sejumlah produk hukum di Indonesia. *E-government* merupakan salah satu wujud pelaksanaan agenda prioritas pemerintah saat ini, yang muncul dalam poin kedua nawa cita.

Ke-delapan publikasi *UN E-Government Survey* menegaskan bahwa Indonesia termasuk negara dengan tingkat adopsi teknologi yang terbilang cepat. Hal tersebut terbukti dari indikator-indikator dalam indeks TII Indonesia, dimana diketahui bahwa sebagian masyarakat Indonesia memiliki lebih dari satu buah telepon genggam.

Selain itu, sebanyak 36 dari 100 orang Indonesia ditemukan telah memiliki akses terhadap jaringan internet nirkabel. Walau jumlah tersebut masih cukup terbatas dibandingkan dengan keseluruhan populasi, pemerintah Indonesia dapat mengembangkan produk *e-government* yang secara khusus menysasar pada masyarakat yang selalu terkoneksi dengan internet ini.



TANTANGAN IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT DI INDONESIA

Senada dengan sub-bab sebelumnya, terdapat banyak tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah Indonesia guna menerapkan *e-government* dengan maksimal. Poin-poin di bawah ini diidentifikasi berdasarkan temuan-temuan di atas, dengan mengacu pada data dari ke-delapan publikasi *UN E-Government Survey*.

1. Ketersediaan Infrastruktur

Ketersediaan infrastruktur merupakan faktor utama yang menghalangi implementasi *e-government* di Indonesia. Berdasarkan analisis terhadap data yang diperoleh dari *UN E-Government Survey*, diketahui bahwa dari ketiga indeks yang menentukan besaran EGD Indonesia, indeks TII merupakan indeks yang paling rendah.

2. Kesenjangan Digital

Kesenjangan digital berkaitan dengan dinamika permasalahan dalam demografi masyarakat Indonesia. Berdasarkan usia, orang-orang dewasa merupakan target primer produk *e-government*. Namun, pada umumnya kaum muda adalah kelompok yang lebih fasih dalam menggunakan teknologi. Selain itu, tingkat pendidikan merupakan faktor lain yang mempengaruhi implementasi *e-government*. Menurut Hargittai dan Hinnant,⁶ kecenderungan pengguna *e-government* berasal dari masyarakat dengan tingkat pendidikan yang tinggi, sebab mereka menaruh minat yang lebih besar terhadap persoalan pemerintahan dibandingkan kelompok dengan tingkat pendidikan menengah ke bawah.

3. Perbedaan Kepentingan antara Masyarakat dan Pemerintah

Pemerintah dan masyarakat memiliki tujuan yang berbeda ketika menggunakan *e-government*. Pemerintah mengambil sudut pandang managerial, dan menekankan pada fungsi komunikasi *e-government* dalam implementasinya.⁷ Namun, masyarakat mengharapkan adanya peningkatan interaksi (*two-way communication*) dengan pemerintah melalui *e-government*.⁸ Dengan kata lain, perkembangan teknologi *e-government* belum sejalan dengan penguasaan pemerintah terhadap teknologi yang bersangkutan.



KESIMPULAN

Secara umum, Indonesia masih termasuk negara dengan perkembangan *e-government* yang stagnan, bahkan cenderung lambat. Hal ini disebabkan oleh sejumlah faktor, yang dapat diidentifikasi berdasarkan analisis terhadap indeks-indeks EGDI Indonesia.

Faktor pertama yang menyebabkan rendahnya capaian *e-government* Indonesia adalah minimnya infrastruktur penunjang *e-government*. Hal ini terlihat dari kecilnya skor TII Indonesia. Jika dielaborasi dengan temuan survei APJII, permasalahan ini disebabkan oleh belum meratanya domisili pengguna internet di Indonesia. Mayoritas pengguna internet Indonesia berdomisili di Pulau Jawa, sehingga implementasi *e-government* belum dapat diterapkan secara merata pula — dengan hanya berpusat di Pulau Jawa. Bila dibaca lebih lanjut, hal tersebut mengindikasikan adanya kesenjangan digital yang tinggi antara masyarakat yang berdomisili di Pulau Jawa dengan mereka yang berdomisili di luar Pulau Jawa. Besarnya kesenjangan digital ini semakin terlihat bila disandingkan dengan fakta bahwa Indonesia merupakan salah satu negara dengan pengguna internet terbesar di dunia.

Faktor kedua yang menyebabkan rendahnya capaian *e-government* di Indonesia adalah adanya penurunan yang cukup signifikan dalam skor HCI Indonesia, terutama dari tahun 2012 dan seterusnya. Menurut indeks HCI, masih banyak masyarakat Indonesia yang berhenti atau putus sekolah selepas SMP. Tingkat pendidikan seseorang berkaitan dengan kemampuannya untuk memahami dan menggunakan layanan *e-government*, sehingga skor HCI menjadi salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya capaian *e-government* Indonesia. Selain itu, walau tidak termasuk sebagai salah satu indikator pengukuran EGDI, skor EPI Indonesia juga masih terbilang rendah. Padahal, tingkat kesuksesan layanan *e-government* berkaitan dengan tingkat partisipasi masyarakat negara yang bersangkutan. Jika dielaborasi dengan adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah dan masyarakat, rendahnya capaian *e-government* Indonesia dapat dimaknai sebagai akibat dari perbedaan kepentingan ini.

Secara umum, capaian *e-government* Indonesia masih berada di bawah capaian rata-rata global dan sub-regional. Meski demikian, perbedaan tersebut tidak terlalu jauh, sehingga Indonesia mungkin saja mengejar ketertinggalannya dalam waktu dekat.



REFERENSI

- ¹Perserikatan Bangsa-Bangsa. (2016). United Nations E-Government Survey 2016: E-Government in Support of Sustainable Development. Diakses pada 25 Agustus 2017. Tersip dalam <http://workspace.unpan.org/sites/Internet/Documents/UNPAN97453.pdf>
- ²Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. (2015). Direktorat E-Government. Diakses pada 21 Agustus 2017. Tersip dalam <https://aptika.kominfo.go.id/index.php/profile/direktorat-e-government>.
- ³Ibid, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), p. xix.
Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. (2016). Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia 2016. Diakses pada 26 Agustus 2017. Tersip dalam <https://apjii.or.id/content/read/39/264/Survei-Internet-APJII-2016>.
- ⁴Michael Gewati. (2016). Minat Baca Indonesia Ada di Urutan ke-60 Dunia. Diunggah pada 29 Agustus 2016. Diakses pada 29 Agustus 2017. Tersip dalam <http://edukasi.kompas.com/read/2016/08/29/07175131/minat.baca.indonesia.ada.di.urutan.ke-60.dunia>.
- ⁵Hargittai, E. & Hinnant, A. (2008). Digital inequality: differences in young adults' use of the internet. *Communication Research*, 35 (5), pp. 602-621.
- ⁶Pieterse, W. (2009). *Channel Choice: Citizens' Channel Behaviour and Public Service Channel Strategy*. Enschede, Belanda: Gildeprint B. V.
- ⁷Ibid, Pieterse (2009).



Center for Digital Society

Faculty of Social and Political Sciences
Universitas Gadjah Mada
Room BC 202, BC Building 2nd floor,
Jalan Socio Yustisia 1
Bulaksumur, Yogyakarta, 55281, Indonesia

Phone : +62 274 563 362 ext. 116
Email : cfds.fisipol@ugm.ac.id
Website: cfds.fisipol.ugm.ac.id

